

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan antarbangsa atau Hubungan Internasional adalah suatu interaksi manusia antarbangsa baik secara individu maupun kelompok yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dalam Hubungan Internasional tidak jauh dari adanya persahabatan antar negara, persengketaan, permusuhan bahkan peperangan. Kompleksitas hubungan internasional telah memberikan alasan kuat terhadap mengapa kita tertarik untuk mempelajari hubungan internasional. Dalam Hubungan Internasional terdapat 3 esensi yang membentuknya, yaitu adanya *actors*, *interests*, dan *power*. Ketiga esensi tersebut nantinya akan membentuk suatu interaksi dalam suatu kesatuan dan menjalankan suatu sistem hubungan internasional.

Keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari negara lain, baik dari skala regional maupun global seperti Kawasan Asia Timur yang merupakan salah satu kawasan poros ekonomi dunia karena merupakan titik strategis dimana kepentingan negara-negara besar bertemu seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan dan Korea Utara, yang saling berebut pengaruh politik dan ekonomi di kawasan ini. Stabilitas keamanan yang tidak menentu akan menyebabkan kawasan dalam kondisi potensial untuk terjadinya konflik. Sehingga terdapat beberapa konflik yang sangat krusial bagi stabilitas regional mengingat adanya negara yang memiliki kekuatan nuklir, kemudian adanya peningkatan pertahanan yang kuat dari salah satu negara di kawasan, selain itu ada juga konflik tentang serangkaian persoalan sosial dan sengketa perbatasan (klaim wilayah kedaulatan) serta adanya sentimental historis membuat negara-negara tersebut berusaha untuk memajukan pertahanan

nasional masing-masing dengan meningkatkan kekuatan militer dan kapabilitas persenjataan.

Adanya pertumbuhan ekonomi Tiongkok dianggap menjadi suatu ancaman baru bukan hanya bagi Amerika Serikat tetapi bagi Korea Selatan dan Jepang, permasalahan ini dikarenakan kekuatan ekonomi akan menunjang adanya perkembangan militer dan modernisasi sistem persenjataan Tiongkok. Perkembangan kapabilitas militer tersebut merupakan bentuk modernisasi yang dilakukan dengan cara meningkatkan anggaran belanja dengan berfokus pada pembaruan alutsista dan sistem persenjataan.

Tiongkok juga merupakan ancaman bagi keamanan nasional Jepang, Rezim Tiongkok di bawah Xi Jinping lebih tegas, terutama dalam ekspansi maritimnya dan telah meningkatkan lebih banyak tekanan ke Jepang baik melalui aktivitas Laut Cina Timur dan yang di Laut Cina Selatan. Tiongkok dianggap sebagai ancaman bagi Jepang karena kedekatan wilayah Tiongkok sangat dekat dengan Jepang, sementara ukurannya sangat besar. Permusuhan historis telah menunjukkan banyak darah buruk di antara kedua negara. Ancaman Beijing dicontohkan dengan kebangkitan ekonomi negara yang cepat (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2022). Tiongkok dalam bidang pertahanannya tidak transparansi mengikuti dengan bagaimana transparansi alokasi dana dari peningkatan pertahanan militer Tiongkok, tidak ada kejelasan pasti Tiongkok bekerja sama dengan negara apa dan bagaimana alokasi anggaran tersebut.

Upaya untuk membendung kekuatan Tiongkok yang kian meningkat yaitu dengan cara semakin meningkatkan hubungan keamanan dan mitra strategis. Seperti adanya aliansi Jepang dan Amerika Serikat, karna dengan menguatnya

peranan Tiongkok membuat negara tersebut memiliki potensi untuk mendominasi Asia Timur, sehingga Jepang merasa kredibilitasnya di kawasan akan terancam. Ancaman tersebut akan berdampak langsung bagi Jepang, karena secara geografis Jepang berada dekat dengan Tiongkok. Hubungan keamanan negara-negara di kawasan Asia Timur memberikan resiko tersendiri bagi kawasan, apalagi ditambah dengan kehadiran Amerika Serikat dalam interaksi keamanannya. Sejalan dengan munculnya berbagai gangguan dan ancaman, maka berbagai upaya pun dilakukan untuk menciptakan keamanan wilayah lautan yang berupa wilayah teritorial sebuah negara maupun diwilayah lautan lepas untuk kepentingan negara maupun masyarakat internasional. Dalam hal pertahanan nasionalnya Jepang mulai berfikir lebih dinamis, sebelum era Perang Dunia dan Perang Dingin terjadi Jepang sudah memiliki sejarah yang panjang. Dengan berakhirnya Perang Dunia II membuat Jepang pada keharusan memenuhi suatu tuntutan para pemenang perang.

Negara Jepang dihadapkan dalam suatu tuntutan besar pasca kekalahannya dalam Perang Dunia II yaitu Jepang harus menjalin hubungan antar negara namun tetap berpegang pada alur politik luar negeri Jepang yang sesuai dengan Konstitusi Demokrasi 1947. Pasal 9 dari Konstitusi yang diterbitkan pada tahun 1947 merupakan dasar Pertahanan Jepang, konstitusi ini dibuat agar Jepang tidak lagi memiliki potensi untuk memulai suatu perang dengan dilumpuhkannya kekuatan bersenjata Jepang baik laut, darat, dan juga udara serta potensi perang lainnya yang ada pasca perang, serta untuk mencegah penggunaan kekuatan militer dalam menyelesaikan pertikaian atau bahkan konflik internasional.

Dengan adanya Konstitusi tersebut yang membuat Jepang tidak bergerak bebas dalam kekuatannya, Amerika Serikat memberikan payung keamanan dan

jaminan perlindungan terhadap negara Jepang dari serangan luar yang datang dan akan mengerahkan kekuatannya untuk menyerang balik, dalam “*Treaty of Mutual Cooperation and Security?* pada tahun 1960 hal tersebut tertuang, ini merupakan revisi dari Perjanjian *Mutual Security Assistance Pact* yang ditandatangani pada tahun 1952, negara Jepang memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat pangkalan dan menempatkan pasukannya di dalam wilayah Jepang. Namun tidak seperti perjanjian lainnya, perjanjian pertahanan ini dibuat tidak seimbang dimana Jepang ditempatkan dalam posisi yang lebih pasif, yang membuat Jepang tidak bisa berbuat sebaliknya jika Amerika Serikat diserang oleh negara atau pun kekuatan yang lain.

Dengan melihat adanya dinamika keamanan kawasan, maka Perdana Menteri Shinzo Abe mengusulkan untuk mengamandemen kembali Pasal 9 Konstitusi 1947, berjalan dengan adanya usulan itu Jepang tetap harus menjalankan program pertahanannya maka secara langsung Jepang dituntut untuk memperbarui program pertahanannya menjadi NDPG (*National Defense Program Guidelines*) yang semula NDPO (*National Defense Program Outlines*). Dengan meningkatnya pertahanan militer Tiongkok membuat negara tersebut menjadi semakin kuat dan menjadi pemukul psikologis negara lain untuk memberitahukan secara nonverbal. Hal ini ditandai dengan keadaan ekonomi yang menurun pada saat itu namun Tiongkok tetap melakukan pengeluaran anggaran dalam hal belanja militer.

Di kawasan ini negara Jepang dan Tiongkok memiliki kekuatan yang sama-sama besar dalam bidang pertahanannya bagaimana tidak, Jepang yang saat ini di payungi oleh Negara adidaya dan memiliki kekuatan pertahanan nomor 1 Negara Amerika Serikat dengan berkonsentrasi pada langkah-langkah *soft power*, hal ini

membuat Jepang tidak main-main dalam kekuatan pertahanannya, ditandai dengan adanya bantuan pembangunan, investasi asing langsung dan tidak langsung, serta promosi budaya. Tiongkok pun tidak kalah berkuasa bagaimana tidak Tiongkok selalu meningkatkan anggaran militernya tiap tahun. Namun hubungan bilateral kedua negara ini sering mengalami ketegangan, konflik yang terjadi selama ini yakni adanya persaingan di bidang alutsista (militer), adanya sengketa wilayah contohnya Claim Tiongkok atas pulau Senkaku yang berada di kepulauan Pinnacle Jepang. Dan juga kehadiran Tiongkok yang agresif di Laut China Selatan dianggap dapat menghalangi kepentingan Jepang.

Jepang memiliki persepsi lain dari adanya peningkatan pertahanan militer Tiongkok karena hal ini dianggap dapat mengancam keamanan dan kepentingan Jepang. Terutama dengan adanya Pasal 9 Konstitusi 1947 yang membuat Jepang memiliki kekuatan militer yang rendah sementara Tiongkok sedang gencar-gencarnya meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, untuk memahami bagaimana peningkatan yang dilakukan oleh Tiongkok sehingga menimbulkan adanya *Security Dilemma* di kawasan, maka tidak cukup hanya dengan memahami keamanan suatu negara saja. Maka penulis tertarik dengan hal ini bagaimana kedua negara besar ini mempertahankan negaranya dengan caranya masing-masing entah beraliansi atau meningkatkan kemampuan dalam bidang pertahanannya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk peningkatan pertahanan militer Tiongkok

2. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Jepang dalam menjaga keamanannya
3. Bagaimana langkah Jepang dalam menghadapi peningkatan pertahanan militer Tiongkok

1.3. Batasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah dan berbagai fenomena yang terjadi di seputar masalah penelitian, maka penulis membatasi pembahasan penelitian ini supaya lebih terfokus dan mendalam, peneliti membatasi pada ruang lingkup antara Jepang dan Tiongkok dalam pertahanan.

Dalam penelitian ini penulis juga memfokuskan penelitian dengan memfokuskan pada kebijakan Jepang di masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe pada tahun 2014 sampai 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah, **“Bagaimana kebijakan keamanan Jepang pada masa pemerintahan era Perdana Menteri Shinzo Abe dalam merespon peningkatan kekuatan militer Tiongkok?”**

1.5. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk peningkatan pertahanan militer Tiongkok?
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan yang dilakukan Jepang dalam menjaga keamanannya
3. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang dilakukan oleh Jepang dalam merespon peningkatan pertahanan militer Tiongkok

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang ada dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk mengukur sejauh mana kemampuan serta pemahaman penulis dalam menganalisis suatu isu dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional dengan pembelajaran yang telah didapatkan penulis selama masa perkuliahan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur bagi penelitian selanjutnya khususnya penelitian mengenai Studi Ilmu Hubungan Internasional di masa yang akan datang.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa Hubungan Internasional dan masyarakat luas pada umumnya.

4. Sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi aktor hubungan internasional, dalam hal ini khususnya negara Jepang untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam merespon peningkatan peningkatan pertahanan militer Tiongkok.

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk panduan untuk memudahkan penulis dalam menulis karya penelitiannya. Sistematika penulisan penelitian ini penelitian ini dibagi ke dalam 5 bab dan masing masing bab memiliki sub bab yang menjelaskan secara spesifik dan mendalam tentang pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan yang penulis buat adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian sebagai ruang lingkup penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang meliputi Literatur reuiu dan Kerangka Konseptual untuk menjabarkan teori-teori dan konsep-konsep yang penulis pakai sebagai untuk menganalisis masalah penelitian. Bab ini juga didukung oleh Hipotesis Penelitian, Verifikasi Variabel dan Indikator dan juga skema kerangka konseptual sebagai gambaran dalam menguraikan masalah penelitian

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang model-model berupa pendekatan paradigma, metode sebagai landasan untuk mengolah dan menginterpretasikan data, kemudian didukung dengan Teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai hasil Analisa terhadap rumusan masalah yang diajukan terhadap respon Jepang Era Shinzo Abe terhadap Peningkatan Pertahanan Militer Tiongkok

BAB V Penutup

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan atau hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam bentuk ringkasan yang singkat namun masih bersifat informat